

Menag Yaqut Ungkap Potensi Biaya Haji Naik di Masa Pandemi

JAKARTA (IM) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas mengatakan, pandemi virus korona berdampak terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Yaqut menjelaskan 4 variabel yang mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami kira dapat dimaklumi bersama bahwa pelaksanaan haji di masa pandemi seperti sekarang ini akan berkonsekuensi pada pembiayaan. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan, sehingga diperlukan penyesuaian BPIH. Terdapat 4 variabel berpengaruh, yaitu kuota, prokes, pajak tambahan, dan kurs," ujar Menag Yaqut dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).

Disebutkan Yaqut, semakin kecil kuota jemaah haji yang ada, maka semakin besar beban biaya untuk para calon jemaah haji. Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait besaran biaya haji tahun ini. "Secara matematis makin kecil kuota jemaah yang diberangkatkan, maka semakin besar beban biaya per orangnya," ujar Yaqut.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan ada beberapa penentu perhitungan biaya ibadah haji 2021.

Salah satunya, adalah perhitungan dalam aspek transportasi. "Salah satu variabel penentu perhitungan tersebut adalah penetapan protokol kesehatan pada aspek transportasi," katanya.

Ia berharap ada sinkronisasi antara setiap kementerian

dan lembaga terkait pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi korona. Sinkronisasi itu akan memudahkan pihak-pihak dalam mengatur biaya dan implementasi proses bagi para calon jemaah haji.

"Kami berharap ada kesepakatan atau sinkronisasi antara ketentuan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan penerapannya dalam kegiatan transportasi menurut Kementerian Perhubungan, terutama mengenai jarak fisik atau physical distancing dan persyaratan test swab. Adanya sinkronisasi antara ketentuan protokol kesehatan memudahkan kami dalam mengimplementasikan skenario sekaligus menghitung biaya secara lebih tepat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menag Yaqut optimistis ibadah haji 2021 akan tetap digelar. Ada sejumlah hal yang jadi membuat Yaqut yakin, salah satunya program vaksinasi di Arab Saudi.

"Kita belum tahu atau belum dapat kepastian apakah Saudi akan menyelenggarakan haji dengan cara yang sama atau lebih terbuka dan mempersilakan kehadiran jemaah dari negara lain. Kita semua tentu berharap situasi yang lebih baik dari tahun lalu. Kami optimis, pemerintah optimis kemungkinan diselenggarakannya ibadah haji tahun ini masih sangat terbuka. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan vaksinasi di Saudi sebagaimana di Indonesia dalam rangka menangani pandemi covid-19," ujarnya. ● mar



RAKER PERSIAPAN HAJI

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji.

Total Sitaan KPK di Kasus Suap Ekspor Benur Mencapai Rp89,9 M

JAKARTA (IM) - KPK menyita uang tunai Rp52,3 miliar terkait kasus dugaan suap ekspor benur lobster atau benur. Namun sebenarnya penyidik KPK sudah menyita sejumlah aset lain yang nilainya bila ditotalkan mencapai Rp89,9 miliar. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membeberkas aset-aset yang disita KPK dalam perkara ini. Adapun asetnya tersebut berupa barang mewah, barang elektronik, kendaraan, uang tunai, perhiasan, hingga properti berupa rumah dan vila.

"Jadi Rp37,6 miliar sudah dilakukan penyitaan berupa aset yang sudah disebutkan tadi dan hari ini (Senin kemarin) uang cash Rp52,3 miliar," kata Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3).

Ali menyebut KPK juga telah memeriksa ratusan saksi dalam penyidikan kasus ini. "Terkait dengan update dari penanganan perkara ini saat ini tim penyidik KPK telah memeriksa 115 saksi dalam perkara ini," ucapnya.

Dalam kasus dugaan suap ekspor benur lobster, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo selaku mantan Menteri KKP. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andrea Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril

Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjo sebagai Direktur PT DPP.

Dari keseluruhan nama itu, hanya Suharjo yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Dari nama-nama tersangka di atas, Suharjo tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo sebesar Rp2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.

"Tidakwa Suharjo telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi sesuatu berupa uang seluruhnya USD103 ribu dan Rp706.055.440 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP RI)," ujar jaksa KPK Siswandono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/2). ● mar

2 Polhukam

IDN/ANTARA



BARANG SITAAN KASUS EKSPOR BENUR

Petugas memperlihatkan uang pecahan seratus ribu rupiah barang sitaan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benur lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3). KPK menyita uang tunai sekitar Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benur lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Ketua MPR: Tak Ada Pembahasan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

"Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," kata Bambang Soesatyo.

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) menepis wacana penambahan masa jabatan presiden Republik Indonesia. Bamsot menegaskan hingga saat ini MPR RI tidak ada membahas soal jabatan presiden.

"Sampai saat ini di MPR tidak ada wacana maupun pembahasan tentang jabatan presiden," kata Bamsot kepada wartawan, Senin (15/3).

Bamsot menjelaskan ketentuan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945).

Dan hingga kini MPR RI tidak pernah membahas perubahan Pasal 7 UU NRI 1945.

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UU NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UU NRI 1945," tegasnya.

Lebih jauh, Bamsot mengatakan periodisasi masa jabatan presiden yang ada saat ini sudah ideal. Ia kemudian menyandingkan masa jabatan presiden Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

"Masa periodisasi jabatan presiden saat ini sudah ideal.

Sama dengan negara embahnya demokrasi, Amerika Serikat yang dalam konstitusinya juga membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali," ujarnya.

Bamsot menegaskan, masa jabatan presiden maksimal hanya dua kali. Hal ini, dikatakannya, dilakukan untuk memastikan regenerasi kepemimpinan di Tanah Air.

"Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," jelas Bamsot.

Selain itu, Bamsot juga menilai stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik adalah kunci pembangunan yang sukses. Karenanya, Bamsot meminta tidak ada propaganda terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

"Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," pungkas Bamsot.

Perihal penambahan masa jabatan Presiden RI awalnya dilontarkan oleh Amien Rais. Mulanya, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia kemudian yang lebih penting lagi, yang

paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," ujar Amien melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3). ● han

Fahri Pengancam 'Bunuh Jokowi' Tetap Dibui 255 Hari

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa terhadap Mohammad Fahri Al Habsyi alias Fahri bin Abdurahman. Alhasil, Fahri tetap dihukum 255 hari penjara karena teriakan 'bunuh Jokowi' pada 2019 lalu.

Kasus bermula saat viral video Fahri tersebar luas di media sosial. Dalam video itu, Fahri bersama seorang pria tengah berjalan pada Rabu, 22 Mei 2019 malam. Dalam video itu, Fahri mengancam akan membunuh Jokowi dan Wiranto.

Akhirnya Fahri ditangkap pada 1 Juni 2019 di rumah keluarganya di Palu, Sulawesi Tengah. Fahri ditangkap tanpa perlawanan. Setelah diproses di penyidik, Fahri diadili di PN Jakpus. Jaksa menuntut Fahri dihukum 2 tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Pada 4 Februari 2020, PN Jakpus menyatakan Fahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan ancaman. Oleh sebab itu, Fahri dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dan 15 hari atau total 255 hari.

Atas putusan itu, jaksa tidak terima dan mengajukan banding. Tapi Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan PN Jakpus pada 6 April 2020. Duduk sebagai ketua majelis Nur Hakim dengan anggota Sugeng Hiyanto dan Muhammad Yusuf.

Jaksa masih dengan tuntutan agar Fahri dihukum 2 tahun penjara. Maka kasasi pun ditentang jaksa.

"Tolak," demikian lansir website MA sebagaimana dikutip, Senin (15/3).

Duduk sebagai ketua majelis Andi Abu Yuyub Saleh dengan anggota Hidayat Manao dan Soesilo. Putusan itu diketok pada 25 Februari 2021 dengan panitera pengganti Emmy Evalina Marpaung. ● dot

PD Klaim Belum Pikirkan 2024, Masih Fokus Lawan Kubu KLB

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berunding ke kementerian Justitia (JK) Minggu. Spekulasi tentu berseliweran termasuk kaitannya dengan Pemilu/Pilpres 2024.

"Kalau bagi kami masih jauh ya bicara mengenai 2024. Karena saat ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai demokrasi tetap tegak di bumi Indonesia," kata Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra, di DPP PD, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

Herzaky mengungkapkan, saat ini PD masih fokus menghadapi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK PD). Ia pun mengagaskan bahwa yang mendapat perhatian besar dari PD saat ini bukan soal koalisi 2024.

"Karena kita tahu adanya kelakuan para pelaku GPK PD secara paksa yang bekerja dengan oknum kekuasaan, ini kan sangat-sangat mengganggu dan mengancam sendi-sendi kehidupan demokrasi Indonesia. Nah ini yang sedang kita perjuangkan, ini perjuangan kita bersama. Inilah yang menjadi perhatian besar partai Demokrat saat ini," katanya.

Herzaky juga mengatakan GPK PD akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia jika mendapat

pengakuan dari negara. Maka dari itu, PD sedang gencar-gencarnya menghadapi kekisruhan ini.

"Karena kalau sampai ini kita biarkan berhasil, ini akan menjadi preseden yang sangat jelek bagi demokrasi Indonesia, hari ini maupun di depannya. Nah inilah yang menjadi concern kami atau perhatian utama partai demokrat saat ini. Sedangkan untuk kepentingan 2024 belumlah, kita belum sampai sejauh itu ke sana. Kalau sampai demokrasi dikoyak-koyak dengan gampangnya, 2024 mungkin tidak ada pemilu," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, AHY melakukan silaturahmi ke kediaman JK. Pertemuan disebut membahas isu-isu terkini hingga masalah kebangsaan.

"Kedatangan kami pagi ini utamanya adalah untuk bersilaturahmi. Bagaimana Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK, Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum," ujar AHY dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Minggu (14/3). ● osm

Kementerian Pertahanan Sosialisasi Program Komponen Cadangan

JAKARTA (IM) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mulai menggelar sosialisasi program komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan negara.

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha mengatakan masyarakat diperbolehkan untuk mendaftar menjadi komponen cadangan di Koramil-Koramil setempat. Komponen cadangan dikelompokkan menjadi komcad matra darat, matra laut, dan matra udara.

Untuk lolos seleksi, calon komponen cadangan di antaranya harus sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Setelah dinyatakan lulus dalam seleksi, calon Komcad wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

Calon komponen cadangan berhak memperoleh uang saku, perlengkapan proranagan lapangan, perawatan kesehatan, serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. "Selesai dilatih mereka akan kembali ke profesi masing-masing," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Senin (15/3).

Calon komponen cadangan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau pekerja/buruh serta mahasiswa tak akan kehilangan hak ketenagakerjaan, pekerjaan, hak akademis, serta status sebagai peserta didik.

"Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka ada program kampus merdeka. Mahasiswa bisa menggunakan satu semester untuk mengambil mata kuliah di program studi lain, maupun untuk ikut komponen cadangan," ungkap Dadang.

Adapun program ini terbuka bagi Warga Negara Indo-

nesia berusia 18-35 tahun yang ingin secara sukarela menjadi tentara cadangan. Keberadaan komponen cadangan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya.

"Kita harus menyiapkan segala sesuatunya [untuk pertahanan negara] mulai dari SDM dan SDA sehingga sewaktu-waktu diperlukan kita sudah siap," ujar Dadang.

Ia juga menambahkan sudah saatnya Indonesia memiliki tentara cadangan, seperti negara tetangga lain di kawasan, seperti Singapura, Vietnam, Thailand dan Filipina. "Indonesia memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta dan jumlah tentara aktif 438 juta, tetapi tidak punya tentara cadangan. Sementara negara lainnya sudah punya," ujarnya. ● han



KETERSEDIAAN VAKSIN COVID-19

Seorang jurnalis mendapatkan vaksin CoronaVac dosis kedua di RSUD Petala Bumi, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (15/3). Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin yang masih terbatas untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua, dimana pada bulan Maret-April ada ketersediaan 15 juta dosis perbulan, sehingga jumlah penyuntikan hingga 500.000 perhari, atau naik dari sebelumnya hanya 100.000 per hari.

PENGUMUMAN	ANNOUNCEMENT
FAIRCROWN COMPANY LIMITED Perusahaan No. 305572 (dalam likuidasi sukarela)	FAIRCROWN COMPANY LIMITED Company No. 305572 (in voluntary liquidation)
PEMBERITAHUAN ini diberikan, sesuai dengan BVI Business Companies Act 2004, bahwa perusahaan yang disebutkan di atas, dalam likuidasi sukarela. Likuidasi sukarela dimulai pada tanggal 4 Maret 2021 dan Eldon Solomon dari Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary liquidator.	NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 that the above named company, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 4 March 2021 and Eldon Solomon of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary liquidator.
Tertanggal, 4 Maret 2021 (Ttd) Eldon Solomon Likuidator	Dated, 4th March 2021 (Sgd) Eldon Solomon Voluntary Liquidator